

SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB PEMILIK KAPAL PENANGKAP
IKAN TERHADAP KESELAMATAN AWAK KAPAL DAN
NELAYAN BURUH DI AIA BANGIH KABUPATEN
PASAMAN BARAT**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Universitas Andalas*

Oleh:



NAILA FITRIA
1910113102

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PERDATA BISNIS (PK II)

Pembimbing :

Dr. Rembrandt,S.H., M.Pd
Dr. Yussy Adelina Mannas,S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2023

TANGGUNG JAWAB PEMILIK KAPAL PENANGKAP IKAN TERHADAP KESELAMATAN AWAK KAPAL DAN NELAYAN BURUH DI AIA BANGIH KABUPATEN PASAMAN BARAT

(Naila Fitria, 1910113102, Dr Rembrandt, S.H., M.Pd, Dr Yussy Adelina Mannas, S.H., M.H., Fakultas Hukum Universitas Andalas, 78 Halaman, 2023)

ABSTRAK

Nelayan adalah setiap orang yang melakukan pencaharian ikan, nelayan terbagi menjadi empat, yaitu nelayan kecil, nelayan tradisional, nelayan buruh, dan nelayan pemilik. Nelayan buruh bekerja dikapal milik nelayan pemilik atau biasa disebut sebagai pemilik kapal. Pemilik kapal dan nelayan buruh yang melakukan kerja sama tentu terdapatnya tanggung jawab di antara keduanya. Tanggung jawab merupakan bagian dari suatu perjanjian kerja antara kedua belah pihak yang melakukan hubungan kerja. Perjanjian kerja menimbulkan hak dan kewajiban, di dalam perjanjian kerja terdapat syarat sah perjanjian didalam Pasal 1320 KUHperdata. Pemilik kapal dan nelayan buruh di Aia bangih melakukan perjanjian kerja berbentuk lisan, pemilik kapal wajib melakukan perlindungan atas risiko kecelakaan kerja dan kehilangan jiwa bagi nelayan buruh sesuai dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatra Barat Pasal 22 Ayat (4) Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan dalam undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang mana dalam Undang-undang tersebut dijelaskan hak nelayan untuk mendapatkan perlindungan dan keselamatan kerja. Salah satu bentuk keselamatan kerja adalah asuransi, asuransi yang dimaksud untuk nelayan berupa BPJS Ketenagakerjaan. Masyarakat Aia Bangih terkhusus nya untuk nelayan buruh masih banyak yang belum menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan. Sistem pengupahan yang dilakukan di masyarakat Aia Bangih juga dalam bentuk sistem bagi hasil sehingga tidak adanya upah yang pasti setiap bulannya. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah (1) Bagaimana pelaksanaan perjanjian pemilik kapal penangkap ikan dengan nelayan buruh di Aia Bangih Kabupaten Pasaman Barat (2) Apakah perjanjian kesepakatan kerja antara pemilik kapal penangkap ikan dengan nelayan buruh telah melindungi hak jaminan sosial bagi para nelayan buruh(3) bagaimana bentuk tanggung jawab pemilik kapal penangkap ikan terhadap kecelakaan kerja atau kerugian. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yang diambil dari data primer dengan melakukan wawancara dan studi dokumen dan data sekunder dengan mengolah bahan primer, bahan sekunder dan bahan tersier dan selanjutnya dianalisa secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian beberapa pemilik kapal di Aia Bangih belum memenuhi tanggung jawab nya dalam menunaikan kewajiban memberikan perlindungan jaminan sosial kepada nelayan buruhnya, Untuk itu Dinas kelautan dan perikanan harus lebih mengawasi agar nelayan buruh di Aia Bangih mendapatkan hak nya dari pemilik kapal.

Kata Kunci : Nelayan, Perjanjian,BPJS Ketenagakerjaan, Aia Bangih